



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah dan juga pembantuan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Bupati, dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk itu perlu dipahami dan diimplementasikan azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan sesuai dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 2019 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, proporsionalitas dan profesionalitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :



1. Memacu stakeholder untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat berperan menciptakan pemerintahan yang berazaskan kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisa lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (Lima) tahun. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada perumusan isu-isu strategis. Dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau. diatas serta permasalahan Rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.



Berikut ini adalah isu-isu strategis yang menjadi tujuan serta sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi
- d. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencanan di desa/kelurahan

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

1.4.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:



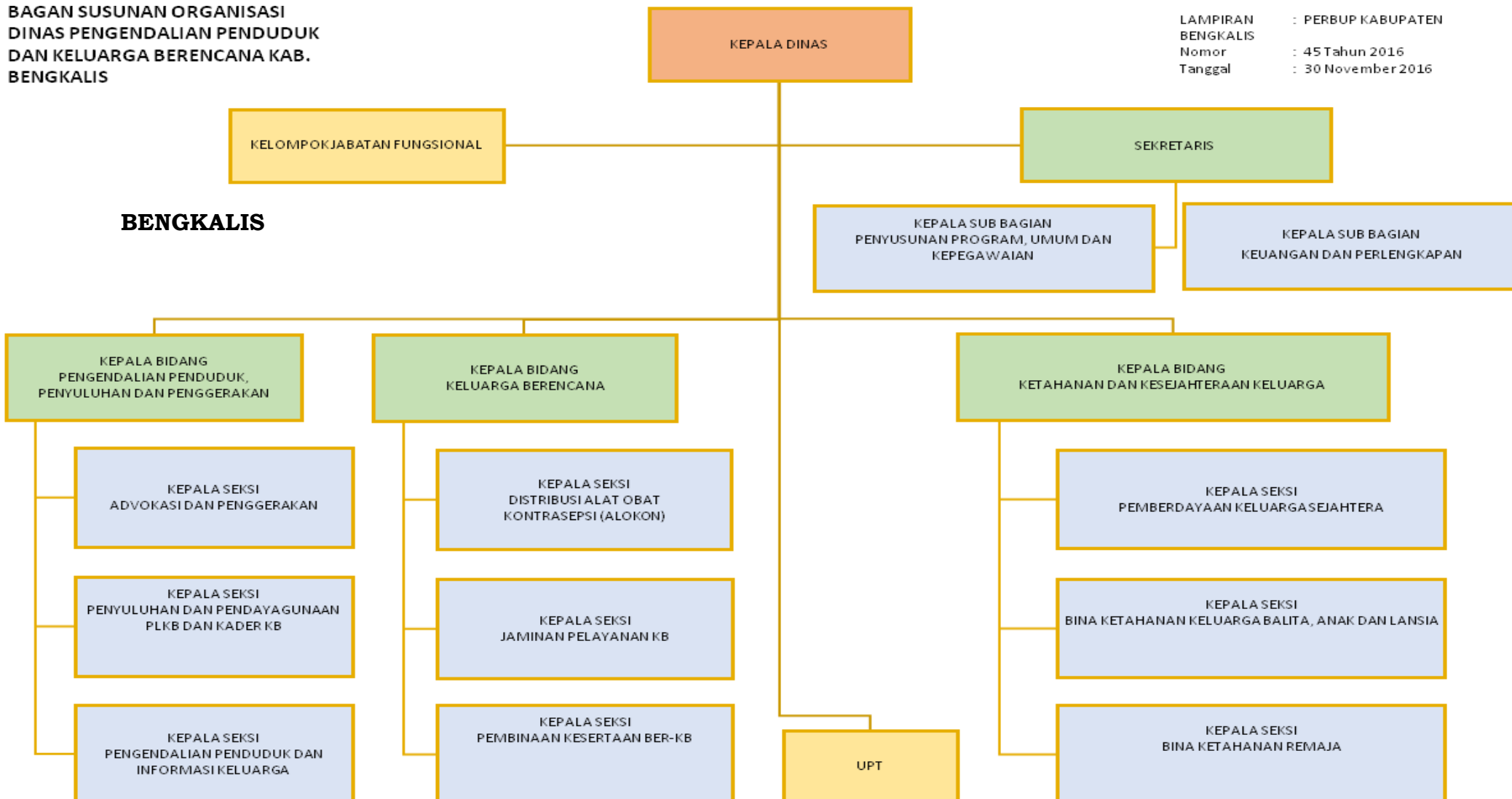
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.4.3. Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB.
BENGKALIS

LAMPIRAN : PERBUP KABUPATEN
BENGKALIS
Nomor : 45 Tahun 2016
Tanggal : 30 November 2016





1.5. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, guna menjalankan roda organisasi dalam menjalankan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya manusia berjumlah 40 orang PNS dengan rincian jumlah PNS menurut jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	2	1	3
4	Eselon IV a	3	8	11
Jumlah		7	9	16

Jumlah PNS perempuan mendominasi berdasarkan jenis jabatan dengan jumlah perempuan ada 9 orang dan laki-laki 7 orang. Dari total pegawai negeri sipil 40 orang dan PNS perempuan ada 20 orang dan PNS laki-laki juga 20 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.



**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Berdasarkan Pangkat**

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	1	-	1
2	IV b	1	-	1
3	IV a	4	2	6
4	III d	2	4	6
5	III c	1	3	4
6	III b	1	3	4
7	III a	2	5	7
8	II d	3	2	5
9	II c	5	-	5
10	II b	-	-	-
Jumlah		20	20	40

**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	5	1	6
2	S 1	6	10	16
3	D 3	-	4	4
4	SLTA	8	6	14
Jumlah		19	21	40



Jumlah PNS sebagian besar lulusan S1 sejumlah 16 orang, berpendidikan D3. 4 Orang, SLTA 14 orang dan S2 6 orang, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini merupakan potensi bagi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis. Namun dari jumlah PNS tersebut belum memadai karena belum diberdayakan semuanya, selain motivasi dari PNS biasa – biasa saja yang membuat sumber daya ini sebagian besar masih berupa potensi saja, dan belum efektif karena mereka belum menggunakan perannya secara optimal dalam melaksanakan tugas.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan merujuk pada pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pada pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa “Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah “.



Ditingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi Perangkat Daerah, disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 dan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015-2019 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.



2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



2.3. Identifikasi Permasalahan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun mendatang megemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang di butuhkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun;
2. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun.
3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR).
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



2. Komitmen pemerintah pusat di dalam penyediaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana. Sehingga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran KKBPK di daerah dengan bantuan DAK untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB.
3. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan adanya program-program khusus untuk meningkatkan KKBPK di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2016-2021.
4. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program KKBPK.
5. Tingginya partisipasi dari faskes-faskes yang ada di Kabupaten Bengkalis.
6. Kebiasaan /adat untuk tidak menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan.
7. Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program KKBPK di Kabupaten Bengkalis.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Rencana Strategis Tahun 2016- 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Persentase angka laju pertumbuhan penduduk	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63
		2. Kepadatan Penduduk KM 2	70	71	72	73	74	74	77
2.	Meningkatnya pengendalian angka kelahiran	Menurunya angka kelahiran total (TFR)	2,54	2,54	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	42,54	53	61	63	64	65	65
		2.Meningkatnya persentase kesertaan KB Baru	61,1	61,3	65,5	65,7	65,9	66,0	66,1
		3. Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	30%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
4.	Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Persentase Kelompo PIK-R Aktif	30%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
5	Meningkatnya Kualitas Capaian kinerja	1. Predikat Akuntabilitas kinerja	-	-	-	CC	B	BB	BB
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	-	55	80	90	95

		keuangan							
6	Meningkatnya dukungan manajemen dalam administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63
		2. Kepadatan Penduduk KM 2	70	71	72	73	74	74	77
2.	Meningkatnya pengendalian angka kelahiran	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,54	2,54	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1. Meningkatkan persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	42,54	53	61	63	64	65	65
		2. Meningkatkan persentase kesertaan KB Baru	61,1	61,3	65,5	65,7	65,9	66,0	66,1
		3. Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	30%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
4	Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Perentase PIK-R aktif	30%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
5	Meningkatnya	1. Predikat	-	-	-	CC	B	BB	BB

Kualitas Capaian kinerja	Akuntabilitas kinerja								
	2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	-	-	-	55	80	90	90	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam menjalankan kegiatan pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki target- target yang telah ditetapkan melalui RENSTRA OPD yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan pelaksanaan kegiatan dengan rincian target capaian antara kepala daerah dengan kepala dinas, kepala dinas dengan kepala bidang serta kepala bidang dengan kepala subbagian atau kepala seksi.

Tujuan dari perjanjian kinerja diharapkan dalam melaksanakan kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada akhirnya diharapkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tadi berhasilguna.

Berikut disampaikan Perjanjian Kerja Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Menurunnya angka laju Pertumbuhan Penduduk	1,64%
	2. Kepadatan Penduduk KM2	74
Meningkatnya Pengendalian angka kelahiran	1. Menurunnya angka kelhairan Total (TFR)	2,52
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1. Meningkatkan Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	64%
	2. Meningkatnya persentase kesertaan KB baru	65,9%
	3. Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) yang aktif	45%
Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Persentase PIK-R aktif	45%



Meningkatnya Capaian Kinerja	Kualitas	1.Predikat Kinerja	Akuntabilitas	B
		2.Persentase hasil Keuangan	Tindak lanjut Pemeriksaan	80

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melaksanakan 5 sasaran dengan 9 indikator. Hal ini dapat di lihat pada tabel perjanjian kinerja di atas. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 bertujuan untuk mencapai sasaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

- > 100% : Tercapai Melebihi Target (TMT)
- = 100% : Tercapai Sesuai Target (TST)
- < 100% : Tidak Tercapai (TT)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD Tahun 2019.

Tabel**Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	1,64%	1,28%	122 %
		2. Kepadatan Penduduk KM2	74	68	108,11%
2.	Meningkatnya Pengendalian Angka Kelahiran	1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,52	2,78	90,65%
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1. Meningkatkan persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	64%	63,68%	99,50%
		2. Meningkatkan persentase kesertaan KB Baru	65,9%	74,13%	112,49%
		3. Persentase kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) yang aktif	45%	160%	355,56%
4.	Meningkatnya kelompok Generasi Berencana	1. Persentase PIK-R aktif	45%	85,45%	189,89 %
5.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	100%
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	80	100	125%



B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator tersebut telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.



**SASARAN 1: MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK**

Indikator kinerja Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KET
1.	Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	%	1,64	1,28	122	
2.	Kepadatan Penduduk KM 2		74	68	108,11	

Indikator Jumlah menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk dari target 1,64 dapat terealisasi sebesar 1,28, hal ini dapat dicapai karena berhasilnya menyampaikan informasi/ advokasi dan KIE kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya pada saat dilaksanakan kegiatan pencahangan moment- moment kegiatan KKBPK di Kabupaten Bengkalis, sedangkan jumlah kepadatan penduduk dari 74/KM2 dapat terealisasi sebesar 68/KM2



SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN

Indikator kinerja menurunnya angka kelahiran total (TFR)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN % 2019	KET
1..	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	%	2,52	2,78	90,65	

Indikator penurunan angka kelahiran total (TFR) dapat tercapai dengan realisasi sebesar 2,78% dengan target sebesar 2,52%. Target belum tercapai untuk itu perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait. Hal ini terutama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khusus wanita usia subur (WUS 15-49 tahun) tentang pentingnya mengikuti program KB.

Mitra strategis program KKBPK antara TNI, TP PKK, IBI dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung di dalam Fapsedu, khususnya dalam pemberian advokasi dan KIE kepada masyarakat.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM KB

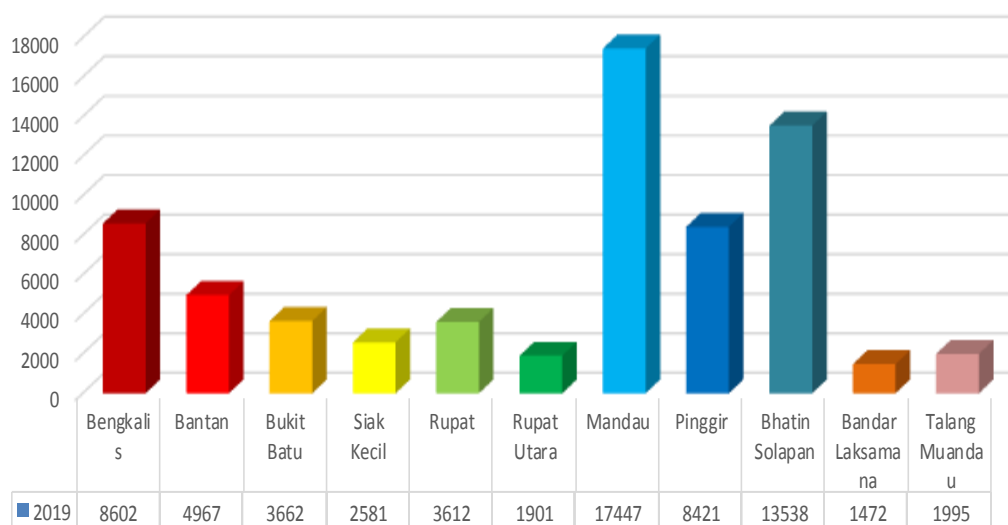
1. Indikator kinerja meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KET
1.	Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	64	63,68	99,50	

Berikut jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan kesertaan ber KB (Peserta KB aktif) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2019.

NO	KECAMATAN	PASANGAN USIA SUBUR	PESERTA AKTIF
1.	BENGLALIS	12.840	8602
2.	BANTAN	7.357	4967
3.	BUKIT BATU	5.527	3662
4.	SIK KECIL	3.686	2581
5.	RUPAT	6.338	3612
6.	RUPAT UTARA	2.486	1901
7.	MANDAU	28.996	17447
8.	PINGGIR	14.396	8421
9.	BANDAR LAKSAMANA	2.197	13538
10.	BHATIN SOLAPAN	20.676	1472
11.	TALANG MUANDAU	2.594	1995
T O T A L		107.095	68.198

GRAFIK KESERTAAN KB AKTIF PER KECAMATAN - 2019



2. Indikator kinerja Meningkatnya prosentse kesertaan KB baru

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KET
1.	Meningkatnya persentase kesertaan KB baru	%	65,9	74,13	112,49	

Berikut data realisasi peserta KB Baru tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis berdasarkan lokasi Kecamatan.

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI
1.	BENGKALIS	1891	984
2.	BANTAN	552	440
3.	BUKIT BATU	196	341
4.	SIK KECIL	219	182
5.	RUPAT	911	218
6.	RUPAT UTARA	262	105
7.	MANDAU	5256	2049
8.	PINGGIR	2364	3326
9.	BHATIN SOLAPAN	2112	1934
10.	BANDAR LAKSAMANA	483	290
11.	TALANG MUANDAU	225	918
TOTAL		14.470	10.787

Indikator meningkatnya persentase kesertaan KB baru tercapai melebihi target, yakni target tahun 2019 sebesar 65,9% sedangkan realisasinya sebesar 74,13%. Namun demikian indikator meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) belum tercapai 100% (baru mencapai sekitar 99,50 %) yakni dari target 64% sedangkan terealisasi sebesar 63,68%.

Hal ini antara lain disebabkan masih cukup tingginya Unmet Need dan kelahiran pada usia dini, ASFR 15-19 tahun, serta masih relative rendahnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK

3. Indikator kinerja Persentase Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KET
1.	Persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif	%	45	160	355,56	

Indikator kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS dari target tahun 2019 terbentuk 80 Kelompok terealisasi sebanyak 236 kelompok di tahun 2019, (295 %) jumlah persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif dari target 45% (36 Kelompok dari 80 kelompok) terealisasi 160% (128 kelompok) aktif ditahun 2019 (prosentase capaian 355,56%)



SASARAN 4 : MENINGKATNYA KELOMPOK GENERASI BERENCANA

- Indikator kinerja Persentase Kelompok PIK- R aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KET
1.	Persentase kelompok PIK-R aktif	%	45	85,45	189,89	

Indikator kinerja jumlah kelompok PIK-R yang terbentuk dari target tahun 2019 sebanyak 55 Kelompok terealisasi sebanyak 97 kelompok di tahun 2019 (Capaian 176,4%), dan jumlah persentase kelompok PIK-R yang aktif dari target 45% (25 Kelompok dari 55 kelompok) terealisasi 85,45 (47 kelompok aktif) dengan poosentase capaian dari target 189,89 % ditahun 2019. Hal ini dapat tercapai berkat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat serta pihak-pihak terkait

C. Realisasi Keuangan

Di dalam tahun anggaran 2019 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.103.111.082,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.503.024.497,- atau sekitar 90,06%. Belanja OPD terbagi dalam 2 belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.330.124.158,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 9.172.900.339,-

Setiap belanja langsung yang telah dilaksanakan memiliki outcomes untuk mencapai target- target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan RENSTRA. Berikut rincian Program- program dan kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki 13 kegiatan dengan pagu program sebesar Rp. 1.606.764.304,- dan terealisasi sebesar Rp.1.468.321.476,- atau sebesar 90 %. Outcome program ini adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp. 120.700.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 120.700.000,-. Atau sebesar 100%. Output kegiatan jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun sebanyak 1.825 surat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 172.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 143.095.390,- atau sebesar 82.91% Output dari kegiatan ini terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 Tahun.
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 42.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.914.270,- atau sebesar 13.92%. Output dari kegiatan ini kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun.
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 244.665.700,- dan realisasinya sebesar Rp. 234.081.700,- atau sebesar 95.67%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan kebersihan, bahan kebersihan dan tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun.
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp. 143.231.304,- dan realisasi sebesar Rp 124.648.700,- atau sebesar 87.02%. Outputnya terpenuhinya Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun.
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 55.778.700,- dan realisasinya sebesar Rp. 55.120.700,- atau sebesar 92.21% dengan output terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 Tahun.




- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 49.078.600,- dan realisasinya sebesar Rp. 25.003.600,- atau sebesar 50.95%. Outputnya tersedia komponen listrik dalam 1 tahun.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 17.550.000,- atau sebesar 58.60%. Outputnya tersedianya bahan bacaan bagi peningkatan pengetahuan bagi ASN.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 11.058.000,- atau sebesar 85.06%. Outputnya tersedianya makanan dan minuman rapat- rapat kantor dan makanan bagi petugas jaga malam kantor
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 491.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 484.776.118,- atau sebesar 98,73%. Outputnya terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik ke dalam dan luar daerah.
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 134.400.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 134.400.000,- atau sebesar 100%. Outputnya tersedianya tenaga keamanan kantor.
- l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Rp. 76.800.000,- dengan anggaran sebesar Rp. 76.800.000,- atau sebesar 100%. Outputnya tersedianya jasa sopir kantor.
- m. Publikasi Informasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 28.375.000,- atau sebesar 97.84%. Outputnya Penyediaan informasi pembangunan kepada masyarakat.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, memiliki 7 kegiatan dengan pagu program sebesar Rp. 778.696.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 668.216.913,- atau sebesar 86.03%. Outcome program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 49.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 49.400.000,- atau sebesar 96.80%. Output kegiatan pemeliharaan aset gedung kantor sebagai sarana pelaksanaan kegiatan perkantoran.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 184.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 108.586.913,- atau sebesar 58.05%. Output kegiatan tersedianya kendaraan dinas jabatan/operasional yang baik.
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 82.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 62.590.000,- atau sebesar 76.33%. Output kegiatan tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan bisa dipergunakan.
 - d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan anggaran Rp. 82.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 80.777.000,- atau sebesar 98.51% Output kegiatan tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik.
 - e. Pengadaan Peralatan gedung kantor dengan anggaran Rp. 242.596.000,- dan realisasi anggaran Rp. 231.142.000,- atau sebesar 95.26% Output kegiatan tersedianya peralatan gedung kantor yang baik.
 - f. Pengadaan Mebeuler dengan anggaran Rp. 108.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 107.321.000,- atau sebesar 99.37% Output kegiatan tersedianya mebeuler kantor yang baik.



- g. Pengadaan Pakaian dan perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan dengan anggaran Rp. 28.400.000,- dan realisasi anggaran Rp. 28.400.000,- atau sebesar 100% Output kegiatan tersedianya pakaian perlengkapan ASN dan Petugas lapangan yang baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur memiliki 3 Kegiatan dengan pagu program sebesar Rp. 848.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 586.700.000,- atau sebesar 69.33%. Outcome program ini adalah peningkatan kualitas SDM.
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 105.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 100.700.000,- atau sebesar 95.90%. Output kegiatan keikutsertaan SDM dalam upaya peningkatan kualitas.
- b. Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) dengan anggaran Rp. 741.300.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 486.000.000,- atau sebesar 65.56%. Output kegiatan keikutsertaan SDM dalam upaya peningkatan kualitas.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki 2 kegiatan dengan pagu program sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Outcome program ini adalah sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang mengikat.
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 0,- dan realisasinya sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Output kegiatan penyusunan laporan keuangan program kegiatan SKPD sebanyak 2 laporan. (Rasionalisasi)
- b. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD dengan anggaran Rp. 0,- dan realisasinya sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Output kegiatan dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD sebanyak 5 dokumen. (Rasionalisasi)

- 
5. Program Keluarga Berencana, memiliki 6 kegiatan dengan pagu program sebesar Rp. 2.034.428.898,- dan terealisasi sebesar Rp.1.804.590.720,- atau sebesar 88.70%. Outcome program ini adalah meningkatnya akseptor KB baru dan KB aktif.
- Pertemuan Penelahaan Program KB dengan anggaran Rp. 98.939.700,- dan realisasinya sebesar Rp. 90.564.700,-. atau sebesar 91.54%. Output kegiatan meningkatnya program kerja yg optimal
 - Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK dengan anggaran Rp. 222.139.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 217.302.000,- atau sebesar 97.82%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya peserta KB aktif dibandingkan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan target dari partisipasi masyarakat sebanyak 2.500 orang.
 - Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES) dengan anggaran Rp. 166.121.400,- dan realisasinya sebesar Rp. 105.436.600,-. atau sebesar 83.47%. Output dari kegiatan ini meningkatnya kualitas pelayanan KB di setiap faskes serta tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi di setiap faskes se Kabupaten Bengkalis.
 - Pengadaan alat Obat kontrasepsi dengan anggaran Rp. 58.170.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 56.790.700,-. atau sebesar 97.63 %. Output dari kegiatan ini meningkatnya kualitas pelayanan KB di setiap faskes serta tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi di setiap faskes se Kabupaten Bengkalis.
 - Pembinaan Kampung KB dengan anggaran Rp. 206.166.800,- dan realisasi sebesar Rp. 175.064.600,- atau sebesar 84.91 % Output dari kegiatan ini meningkatnya jumlah dan kunjungan anggota kelompok bina keluarga yang ada di setiap desa. Target yang dicapai sebanyak 205 orang di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rumat dan Kecamatan Rumat Utara.



- a. Pembinaan Keluarga Berencana Melalui HARGANAS dengan pagu sebesar Rp. 112.784.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.633.000,- atau 94.55%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi keluarga yang mengikuti seleksi dan mengikuti moment Hari Keluarga Nasional (HARGANAS). Pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 16 kelompok.
- b. Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Bengkalis dengan pagu sebesar Rp. 183.020.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 145.831.200,- atau 79.68%. Outputnya membentuk 10 kelompok UPPKS dan membantu membuat jalur pemasaran produk UPPKS melalui website/ on line/daring.
- c. Penilaian KB Lestari Kabupaten Bengkalis dengan pagu sebesar Rp. 39.910.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 38.440.000,- atau 96.32%. Output yang diharapkan meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif khususnya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- d. Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sitem Aplikasi Kabupaten Bengkalis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 149.998.900,- terealisasi sebesar Rp. 130.547.900,- atau 87.03%. Target 2019 membentuk 11 Kelompok sesuai dengan jumlah kecamatan sebelum dimekarkan.
- e. Temu Regional Kabupaten Bengkalis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.396.500,- terealisasi sebesar Rp. 59.600.900,- atau 97.08%. Output kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan pengelola/ kader desa tentang program KKBPK.
- f. Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Output yang diharapkan meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif khususnya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).(Rasionalisasi)



- g. Pelatihan Kader BKB dan BKL se Kab Bengkalis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 542.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 368.018.480,- atau 67.88%. Output yang diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan kader untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat
 - h. Gebyar Kampung KB dengan pagu anggaran sebesar Rp. 249.996.300,- terealisasi sebesar Rp. 206.482.800,- atau 82.59%. Output yang diharapkan meningkatkan keikutsertaan peserta KB dalam program KKBPK
 - i. Penyusunan Parameter Kependudukan Kab Bengkalis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 78.206.000,- atau 81.61%. Output yang diharapkan agar program KKBPK khususnya tentang Kependudukan di Kab Bengkalis bisa lebih baik lagi
 - j. Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.731.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.506.665.000,- atau 91.83%. Output yang diharapkan meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif khususnya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR memiliki 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 792.487.490,- terealisasi sebesar Rp. 632.410.950,- atau sebesar 79.80%.
- a. Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten dengan pagu anggaran sebesar Rp. 421.924.790,- terealisasi sebesar Rp. 368.172.290,- atau 86.04%, outputnya Keikutsertaan kelompok GenRe (Generasi Berencana) yang telah dibina pada ajang- ajang pencarian bakat tingkat Provinsi dan Nasional.



- b. Pengiriman PIKR Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 229.711.000,- dan realisasi sebesar Rp. 164.791.960.- atau 71.74%. Outputnya Pembinaan dan pelatihan kepada PIK-R dan keikutsertaan kelompok PIK-R pada ajang lomba-lomba tingkat Provinsi dan Nasional.

Berikut disajikan pagu anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan per program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, sebagai berikut :



Tabel 2.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Program/Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI			
				FISIK	TERTIMBANG	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.606.754.304,-	100,00		100,00	90,76	1.458.321.476,-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	120.700.000,-	100,00		100,00	100	120.700.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	172.600.000,-	100,00		100,00	82,91	143.095.390,-
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	42.500.000,-	100,00		100,00	13,92	5.914.270,-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	244.665.700,-	100,00		100,00	95,67	234.081.700,-
5	Penyediaan alat tulis kantor	143.231.304,-	100,00		100,00	87,02	124.646.700,-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.778.700,-	100,00		100,00	92,21	55.120.700,-
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.078.600,-	100,00		100,00	50,95	25.003.600,-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,-	100,00		100,00	58,50	17.550.000,-
9	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000,-	100,00		100,00	85,06	11.058.000,-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	491.000.000,-	100,00		100,00	98,73	484.776.116,-
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	134.400.000,-	100,00		100,00	100	134.400.000,-
12	Penyediaan jasa sopir kantor	76.800.000,-	100,00		100,00	95,83	73.600.000,-
13	Publikasi Informasi Pembangunan	29.000.000,-	100,00		100,00	97,84	28.375.000,-
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	776.696.000,-	100,00		100,00	86,03	668.216.913,-
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	82.000.000,-	100,00		100,00	98,51	80.777.000,-



15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	242.596.000,-	100,00		100,00	95,28	231.142.000,-
16	Pengadaan Mebeleur	108.000.000,-	100,00		100,00	99,37	107.321.000,-
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.500.000,-	100,00		100,00	99,80	49.400.000,-
18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	184.200.000,-	100,00		100,00	58,95	108.586.913,-
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Bengkalis	82.000.000,-	100,00		100,00	76,33	62.590.000,-
20	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	28.400.000,-	100,00		100,00	100	28.400.000,-
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	846.300.000,-	100,00		100,00	69,33	586.700.00,-
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	105.000.000,-	100,00		100,00	95,90	100.700.000,-
22	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	741.300.000,-	100,00		100,00	65,56	486.000.000,-
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0.00,-	0.00,-		0.00,-	0.00,-	0.00,-
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00,-	0.00,-		0.00,-	0.00,-	0.00,-
24	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	0.00,-	0.00,-		0.00,-	0.00,-	0.00,-
V	Keluarga Berencana	2.034.428.898,-	100,00		100,00	88,70	1.804.590.720,-
25	Pertemuan Penelahaan Program KB	98.939.700,-	100,00		100,00	91,54	90.564.700,-
26	Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK	222.139.000,-	100,00		100,00	97,87	217.302.000,-
27	Pendistribusian Obat dan Pembinaan Fasilitas Kesehatan (FASKES)	166.121.400,-	100,00		100,00	63,47	105.436.600,-



28	Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	58.170.000,-	100,00		100,00	97,63	56.790.700,-
29	Pembinaan Kampung KB	206.166.800,-	100,00		100,00	84,19	175.064.600,-
30	Penyusunan Prasarana dan Sarana Program Keluarga Berencana (DAK) Kabupaten Bengkalis	1.282.891.998,-	100,00		100,00	90,38	1.159.432.120,-
VI	Pelayanan Kontrasepsi	487.884.000,-	100,00		100,00	77,94	380.235.000,-
31	Penyediaan Pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	98.753.000,-	100,00		100,00	96,66	95.453.000,-
32	Penyediaan Pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes	280.000.000,-	100,00		100,00	62,76	175.733.000,-
33	Penyediaan Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	109.131.000,-	100,00		100,00	99,92	109.049.000,-
VII	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	4.167.025.700,-	100,00		89,74	87,41	3.642.425.280,-
34	Pembinaan Keluarga Berencana Melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	112.784.000,-	100,00		100,00	94,55	106.633.000,-
35	Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	183.020.000,-	100,00		100,00	79,68	145.831.200,-
36	Penilaian KB Lestari	39.910.000,-	100,00		100,00	96,32	38.440.000,-
37	Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	149.998.900,-	100,00		100,00	87,03	130.547.900,-
38	Temu Regional Kabupaten Bengkalis	61.396.500,-	100,00		100,00	97,08	59.600.900,-
39	Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	Pelatihan Kader BKB dan BKL se Kabupaten Bengkalis	542.130.000,-	100,00		100,00	67,88	368.018.480,-
41	Gebyar Kampung KB	249.996.300,-	100,00		100,00	82,59	206.482.800,-
42	Penyusunan Parameter Kependudukan	95.830.000,-	100,00		100,00	81,61	78.206.000,-



	Kabupaten Bengkulu						
43	Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	2.731.960.000	100,00		100,00	91,83	2.508.665.000,-
VIII	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	792.487.490,-	100,00		100,00	79,80	632.410.950,-
44	Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	427.924.790	100,00		100,00	86,04	632.410.950,-
45	Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	229.711.000	100,00		100,00	71,74	164.791.960,-
46	Pembinaan bagi PIK-Remaja di sekolah Se-Kabupaten Bengkulu	60.497.900,-	100,00		100,00	55,23	33.412.900,-
47	Orientasi Pendidikan Kependudukan Bagi Kader di Kampung KB Kabupaten Bengkulu	74.353.800,-	100,00		100,00	88,81	66.033.800,-



D. Prestasi atau Penghargaan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disampaikan sebagai berikut:

Daftar Prestasi Atau Penghargaan

No	NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN	TINGKAT	PRESTASI TAHUN 2019	KET
1.	Juara 1 Keikutsertaan KB Lestari 20 Tahun	Provinsi	√	a.n Bapak Jayan dan Ibu Sumarti
2.	Juara II Pemenang Bidan IUD	Provinsi	√	a.n Hafniza Arif
3.	Juara II BKB Paripurna	Provinsi	√	a.n Harmonis Desa Teluk Latak
4.	Juara I Jambore Remaja	Nasional	√	PIKR NUANSA SMANSA
5.	Juara II GenRe Remaja	Provinsi	√	PIKR NUANSA SMANSA

Penerima Penghargaan Juara 1 Tingkat Provinsi Riau untuk keikutsertaan KB Lestari 20 Tahun a.n Bapak Jayan dan Ibu Sumarti



Juara I Jambore Remaja Tingkat Nasional PIKR NUANSA SMANSA





Juara II GenRe Remaja Tingkat Provinsi PIKR NUANSA SMANSA





BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Penulisan LAKIP ini perwujudan dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum yang termasuk dalam Interpretasi memuaskan Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.103.111.082 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.503.024.497 secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.



Berdasarkan pagu indikatif jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah 90,06% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan telah optimal, efektif dan efisien dalam target kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL. MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680605 198909 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan amanat yang diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang- kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP disamping merupakan alat akuntabilitas, sekaligus juga sebagai sarana yang strategis untuk evaluasi organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi kedepan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama berdirinya organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, yang sebelumnya bergabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Langkah pada tahun pertama ini disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016- 2021 dan RENSTRA 20126-2021. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator- indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

> 100%	:	Tercapai Melebihi Target (TMT)
= 100%	:	Tercapai Sesuai Target (TST)
< 100%	:	Tidak Tercapai (TT)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk dari target 1,64% dapat terealisasi sebesar 1,28%. Indikator menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari target 2,52% terealisasi sebesar 2,78 %, belum dapat dicapai sesuai target karena masih terealisasinya capaian target kesertaan ber KB. Upaya peningkatan kesertaan ber KB secara terus menerus telah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penyampaian informasi/ advokasi dan KIE kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis,



khususnya pada saat dilaksanakan kegiatan pencahangan moment-moment kegiatan KKBPK di Kabupaten Bengkalis.

Indikator meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) realisasi sebesar 63,68% dengan target sebesar 64%. Dan indikator persentase kesertaan KB baru dari target 64 dapat terelisasi sebesar 63,68%, Faktor keberhasilannya adalah peningkatan pemahaman masyarakat khususnya wanita usia subur (WUS 15-49) tentang pentingnya mengikuti program KB dengan merencanakan kelahiran, Kerjasama antar stakeholder bidang KKBPK yang solid dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung di dalam Fapsedu terjalin dengan baik sehingga di dalam pelaksanaan pemberian advokasi dan KIE kepada masyarakat dapat tercipta dan berjalan sesuai dengan harapan.

Indikator Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS tercapai target, dimana target tahun 2019 sebesar 70 dan realisasinya sebesar 160 kelompok, dan indikator persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif pada tahun 2019 dengan target 60% (128 kelompok) terealisasi sebesar 266,67% (236 kelompok).

Indikator jumlah kelompok generasi berencana (PIK-R) tahun 2019 dengan target sebanyak 45 Kelompok tercapai sebanyak 47 kelompok, sedangkan Persentase PIK-R aktif di tahun 2019 dengan target sebesar 45 % terealisasi sebesar 188% , Pencapaian target tersebut terutama berkat dukungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Desa setempat.



Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2019.

Laporan LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Drs. H. ISMAIL, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680605 198909 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3 ISU STRATEGIS	4
1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS	10
2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	11
2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TANTANGAN DAN PELUANG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
3.4 PRESTASI ATAU PENGHARGAAN	38
BAB IV PENUTUP	41



KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan LAKIP Tahun 2019 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2019. Laporan LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga akan berkontribusi positif mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 02 Januari 2020

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis,

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002

